

a. Skala Prioritas P-APBD

Belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun selaras dengan tema pembangunan dan berdasarkan skala prioritas daerah yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Transformasi Ekonomi Inklusif, Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, Pembangunan infrastruktur dan konektivitas, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Peningkatan stabilitas, kondusivitas dan keamanan daerah menghadapi Pilkada, serta Pembangunan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

b. Optimalisasi PAD

Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pendapatan lain yang sah melalui Optimalisasi Database Potensi PAD; Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah; Menyusun tarif pajak dan retribusi baru untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah; Melakukan pendataan ulang obyek dan subyek pajak daerah untuk memperkuat basis data pajak daerah; Meningkatkan pengawasan dan Digitalisasi Pembayaran Pajak serta Retribusi Daerah.

c. Transparansi dan akuntabilitas

Kinerja pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan capaian WTP sebanyak 8 kali berturut-turut sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tertib administrasi melalui:

- 1) evaluasi penyerapan anggaran oleh tim TEPRAs;
- 2) evaluasi capaian kinerja tiap triwulan sebagaimana Permendagri 86 Tahun 2017;
- 3) penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
- 4) optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 5) Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK) yang diukur dari capaian kesesuaian mulai dari perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja.